# PERATURAN DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 7 TAHUN 2021

**Tentang** 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2022



PEMERINTAH DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021



# PEMERINTAH DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

# PERATURAN DESA KRADENANREJO NOMOR 7 TAHUN 2021

#### TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRADENANREJO TAHUN ANGGARAN 2022

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA DESA KRADENANREJO

#### Menimbang

- : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemeritahan Desa berasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan selahtera;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

#### Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 6. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
- 27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021.
- 29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor );
- 30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor ):
- 31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
- 32. Peraturan Desa Kradenanrejo Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungpring;
- 33. Peraturan Desa Kradenanrejo Nomor Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kradenanrejo Tahun 2016;
- 34. Peraturan Desa Kradenanrejo Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Kedungpring Tahun 2022.

# Dengan Kesepakatan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRADENANREJO dan KEPALA DESA KRADENANREJO

## MEMUTUSKAN:

		Kar	

PERATURAN DESA KRADENANREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRADENANREJO TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kradenanrejo Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp	1.758.556.100,-
b. Belanja Desa	Rp	1.758.556.100,-
Surplus / Defisit	Rp	0,-

c. Pembiayaan

1)	Penerimaan	Rp	0,-
2)	Pengeluaran	Rp	25.000.000,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini ;

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar keglatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kradenanrejo.

Ditetapkan di Kradenanrejo Pada Tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA KRADENANREJO

H. HARNO

Diundangkan di Kradenanrejo Pada Tanggal Desember 2021

SEKRETARIS DESA KRADENANREJO

M. YUSUF

Lembaran Desa Kradenanrejo Tahun 2021 Nomor

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KRADENANREJO
NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KRADENANREJO TAHUN ANGGARAN 2022

	TAHON ANGGARAN Z	.022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.658.556.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	30.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.783.556.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	396.778.820,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.510.280,00	
5.3.	Belanja Modal	782.667.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	394.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.758.556.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa.	25.000.000,00.	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

ABUPALAMONGAN, 34 December 2024.

KEPALA DESA

LAMPIRAN PERATURAN DESA KRADENANREJO NOMOR 00 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KRADENANREJO TAHUN ANGGARAN 2022

	KODE URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.000.000,00	
	4:2:	Pendapaian-Transfer	1,858,556,100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	30.000.000,00	
	4.0.	JUMLAH PENDAPATAN	1.783.556.100,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	526.289.100,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	447.220.700,00	
1,1,01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	THE REAL PROPERTY.
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
.1.03	17.15	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.253.620,00	ADD, PBH
.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.253.620,00	
1.1:04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK; Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	29:216:880,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.216.880,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	13 13 13
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	13
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	95.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	95.000.000,00	100
1.1.93	100	Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1,1,93.	. 5.2.	Belenja Bereng den Jose	2,500,000,00	Joseph .
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	MILES .
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	1 100 100
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	A COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY
1.1.96	1	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	1

KODE URAIAN URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	NG 2	3	4	5
		Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.96	5.2.	· Operasional Linmas	/25.000,00	· ADD
1.1.97	50	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.1.97	5.2.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1,3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.000.000,00	DDS
1,3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
	U.6.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.068.400,00	
1.4.03	Ber 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	ADD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03	5.2.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dli)	4.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.93		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	56.568.400,00	DLL, PBK
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.568.400,00	
2	1	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	812.667.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	45.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.000.000,00	DDS
2.2.02-	5.2:	Belanja Darang dan Jasa	30,000,000,000	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	705.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	215.000.000.00	DDS. PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	215.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili h)	140.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	350.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	100
2.5.	9	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	62.667.000,00	
2.5.91		Perawatan air bawah tanah/perlindungan mata air/kolam untuk mata air	50.000.000,00	DDS
2.5.91	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	1 32-10
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	12.667.000,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	12.667.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	25,000.000,0	2
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,0	0
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	15.000.000,0	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,0	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,0	0

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
REKENING		4	5
1 2 4.4.01 4.4.01 5.2: 5 5.1. 5.1.00 5.1.00 5.1.00 5.3.01 5.3.01 5.4.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Beitanjar Bentang dan Jasea  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE  Sub Bidang Penanggulangan Bencana Penanggulanan Bencana Belanja Tidak Terduga.  Sub Bidang Keadaan Mendesak Penanganan Keadaan Mendesak Belanja Tidak Terduga  JIJMLAH RELANJIA  SURPLUS / (DEFISIT)  PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00 10.000.000,00 394.600.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 327.600.000,00 327.600.000,00 1.768.556.100.00 25.000.000,00 (25.000.000,00)	DDS
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4. 4.1. 4.1.4.	PENDAPATAN Pendapatan Asii Desa Lain-Lain Pendapatan Asii Desa	95.000.000,00 95.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	95.000.000,00	
5. <u>1.</u> 1.1. 1.1.90. 5.1.	BELANJA  BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia  Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok  Belanja Pegawai  Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00	- Sumber PAD
5.1.1.90.	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	35,000.000,00	
5.1.2. 5.1.2.90.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	60.000.000,00 60.000.000,00	
-	JUMLAH BELANJA	95.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (PR)	SUMBERDANA
1	2	(Rp)	4
	PENDAPATAN		
4	Pendapatan Transfer	327.731.500,00	
4.2.	Alokasi Dana Desa	327.731.500,00	
4.2.3.	JUMLAH PENDAPATAN	327.731.500,00	
5:	BELANJA	227 724 500 00	
1.1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	327.731.500,00 320.231.500,00	- Links
1.1.	Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	320.231.000,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	and the same of
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.825.200,00	10000
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.518.860,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	12.518.860,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.518.860,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	
5.1.3.2:	Jaminan-Kesehatan Perangkat Desa	10:608:640;00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	27.022,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	243.198,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.962.440,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.962.440,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.162.440,00	#377 F
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.162.440,00	10 m
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.000.000,00	13/11/13
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.800.000,00	and the
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.200.000,00	Bry John
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.600.000,00	L. Call
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.1.4.	Tunjangan BPD	10.200.000,00	
5.1.4:1:	Tunjangan Kedudukan BPD	10:200:000;00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	3.500.000,00	THE RESERVE
5.1.4.	Tunjangan BPD	3.500.000,00	1 3 3
5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPD	3.500.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.200.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.300.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	
1.1.94.	Operasional Posyandu	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2:	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000,00	- Cumbor ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Cumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000.00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.500.000,00	Berly M.
1.1.97.		725.000,00	Sumbar ADD
5.2.	Operasional Linmas  Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	Sumber ADD
			10 1319
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	725.000,00	100 -12 15
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	725.000,00	MI BIRT
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	A PRINCE
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	TOTAL SE
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	THE REAL PROPERTY.
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.000.000,00	THE STATE

Printed by Siskeudes 31/12/2021 11:28:09

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.500.000,00	Sumber ADD
2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.500.000,00	4000
2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	327.731.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
İ	PENDAPATAN	1000	
2.	Pendapatan Transfer	817.267.000,00	
2.1.	Dana Desa	817.267.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	817.267.000,00	
-	BELANJA		
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000,00	
3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.000.000,00	Sumber DDS
	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	
.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	357.667.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan	45.000.000,00	Total Control
02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia,	30.000.000,00	Sumber DDS
	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.000.000,00	
1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	30.000.000,00	
91.	Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	Sumber DDS
	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
6.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
6.1.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	15.000.000,00	1.166
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.000.000,00	1000
11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	38.750.000,00	Sumber DDS
	Belanja Modal	38.750.000,00	1 15 10 10
5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	38.750.000,00	1111
5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	38.750.000,00	111111111111111111111111111111111111111
12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	140.000.000,00	Sumber DDS
	Belanja Modal	140.000.000,00	1
5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	30.000.000,00	100
5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	30.000.000,00	
7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	110.000.000,00	WE ST
7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	110.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (	71.250.000,00	Sumber DDS
100	TPT )	71.250.000,00	WAR THE P
5.3.	Belanja Modal	21.250.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	21.250.000,00	100
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		3.53
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	50.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	50.000.000,00	
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	62.667.000,00 50.000.000,00	Sumber DDS
2.5.91.	Perawatan air bawah tanah/perlindungan mata air/kolam untuk mata air	50.000.000,00	Guina a sa
5.3.	Belania Modal	50.000.000.00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	50.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	50.000.000,00	
2.5.92.	Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran	12.667.000,00	Sumber DDS
	sungai/plengsengan sungai	· March 8	1000 10
5.3.	Belanja Modal	12.667.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	12.667.000,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	12.667.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	25.000.000,00	THE PARTY
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	15.000.000,00	Sumber DDS
5,3.	Belanja Modal	15.000.000,00	1
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	15.000.000,00	1
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	15.000.000,00	
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	No.
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	-57/26
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.000.000,00	1
<u>5.</u>	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	394.600.000,00	1000
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	67.000.000,00	
5.1.00.	Penanggulanan Bencana	67.000.000,00	T. Comments
5.4.	Belanja Tidak Terduga	67.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	67.000.000,00	2 9 25
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	67.000.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	327.600.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	327.600.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	327,600,000,00	
10000	JUMLAH BELANJA	792.267.000,0	
	OUNDATI DELAKON	132.261.000,0	1

EREK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	2	3	4
1	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000,000,00	
i	PEMBIAYAAN		
	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	The state of
.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
1	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	The same

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA

H, HARNO

KODE REK	URAIAN 2	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	PENDAPATAN	3	4
4.2.	Pendapatan Transfer  Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.989.200,00	THE .
4.2.2.		31.989.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	31.989.200,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	31,989,200,00	
1.1.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	31.989.200,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.734.760,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	18.734.760,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.734.760,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.873.476,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	16.861.284,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	13.254.440,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.254.440,00	THE PERSON
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	13.254.440,00	MAN TO BE
5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	13.254.440,00	455 5 183
	JUMLAH BELANJA	31.989.200,00	The same of the same of
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA

erdana	URAIAN 2	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
		3	4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Transfer	481.568.400,00	
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	481.568.400,00	
-	JUMLAH PENDAPATAN	481.568.400,00	
-	BELANJA	401.000.400,00	
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	26.568.400,00	
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.568.400,00	
	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	26.568.400,00	Sumber PBK
	Belanja Barang dan Jasa	26.588.400,00	
	Belanja Barang Perlengkapan	26.568.400,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	26.568.400,00	1000
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	455.000.000,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	455.000.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	155.000.000,00	Sumber PBK
	Belanja Modal	155.000.000,00	C V CO
	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	155.000.000,00	- 13 - 2
3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	155.000.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (	300.000.000,00	Sumber PBK
	TPT)	300.000.000,00	
	Belanja Modal	300.000.000,00	
	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	300.000.000,00	
3.	Bélanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	481.568.400,00	Service State
	JUMLAH BELANJA		
F	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
-	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING

NOMOR: 188/ 7 /413.306.10.1/2022

# TENTANG PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KRADENANREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRADENANREJO . TAHUN ANGGARAN 2022

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRADENANREJO,

# Menimbang

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan : a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kradenanrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kradenanrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kradenanrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.

# Mengingat

- Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

Undang - undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157:

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan

mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang

Pengelolaan Dana Desa;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;

27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022.

29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor );

30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor );

31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

32. Peraturan Desa Kradenanrejo Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungpring;

33. Peraturan Desa Kradenanrejo Nomor Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kradenanrejo Tahun 2016;

34. Peraturan Desa Kradenanrejo Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Kedungpring Tahun 2022.

Memperhatikan:

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kradenanrejo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kradenanrejo tahun anggaran 2022.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRADENANREJO TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kradenanrejo Tahun Anggaran 2022

#### Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uralan dari Pendapatan, Belanja dan Pemblayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

# Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kradenanrejo Pada Tanggal: 31 - 12 - 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Keawa

SUTRISHO



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

# BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA KRADENANREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING

TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 027 / ..... / 413.306.10.1 / 2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh satu bertempat di Balai Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kradenanrejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kradenanrejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Kradenanrejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kradenanrejo menyatakan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kradenanrejo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kradenanrejo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

# Badan Permusyawaratan Desa Kradenanrejo

Tanda Tangan: RMUSYAN 1. Sutrisno Ketua 2. Mustofa KRADENAM Anggota 3. Nurhafidhoh Anggota MATAN 4 4. Usman Anggota 5. Sunandar Anggota 6. Achmad Choirul Anam Anggota 7. Nursalim Anggota